

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i-ii
I PENJELASAN UMUM	1
A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA	1
B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	1
C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR CINDE WILIS	3
E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA	3
II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	4
A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	4
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	8
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN	10
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	10
E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR.....	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	10
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR	11
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	11
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	12
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	12

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	13
J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	13
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	14
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	14
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	14
N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN.....	14
O. PENUTUP	17

BAB I **PENJELASAN UMUM**

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan Publikasi PT. BPR Cinde Wilis posisi 31 Desember 2025 dapat diinformasikan bahwa total aset BPR adalah Rp761.584.855.900, sedangkan modal inti BPR adalah Rp46.094.455.888. Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan *corporate governance*, PT. BPR Cinde Wilis mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *corporate governance* sebagai berikut:

1. UU No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan dan terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. POJK No.7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. POJK No.9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. POJK No.12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
5. POJK No.26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
6. POJK No.23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
7. POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
8. POJK No.9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
9. POJK No.8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
10. POJK No.22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
11. POJK No.19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
12. POJK No.23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. POJK No.3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
14. POJK No.18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perintah Tertulis.

15. POJK No.23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
16. POJK No.15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
17. POJK No.25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
18. POJK No.14 /POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
19. POJK No.51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
20. POJK No.41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.
21. POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
22. POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
23. POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
24. SEOJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
25. SEOJK No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
26. SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
27. SEOJK No.24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
28. SEOJK No.28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
29. SEOJK No.32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.
30. SEOJK No.11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
31. SEOJK No.18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
32. SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
33. SEOJK No.18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
34. SEOJK No.8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan.
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR CINDE WILIS

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. *Independency* (Independensi)

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. *Fairness* (Kewajaran)

BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Cinde Wilis juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Cinde Wilis sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada No. 187 Kav. A 17-19, Jember
Nomor Telepon	:	0331-411999
Penjelasan Umum	:	Struktur Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Cinde Wilis posisi 31-12-2025 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp761.584.855.900, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp46.094.455.888. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Lucia Primastuti Rahayu, SE
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional harian Kantor Pusat, yaitu dengan menjalankan fungsi koordinasi antara Direktur Utama dengan seluruh Direktur dan fungsi pengawasan/pengendalian, fungsi pengarahan, fungsi koordinasi, fungsi konsultasi dan fungsi kolegial terhadap seluruh Biro di Kantor Pusat.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2.	Nama : Bibin Hendra Nusarofa, SE
	Jabatan : Direktur Kredit Komersial
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan aspek perkreditan oleh Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka penyaluran dan monitoring kredit agar dihasilkan kualitas kredit yang sehat dan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran kredit. Melakukan survei pengajuan kredit sampai dengan BMPK perseroan.
3.	Nama : Firman Ardiansyah, SE
	Jabatan : Direktur Kredit Retail
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan aspek perkreditan oleh Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka penyaluran dan monitoring kredit agar dihasilkan kualitas kredit yang sehat dan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran kredit. Melakukan survei pengajuan kredit ≤ Rp. 750 juta (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4.	Nama : Anang Erfantoro, A.Md
	Jabatan : Direktur Pemasaran
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran Kredit dan Simpanan bersama Biro Pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan strategi pemasaran secara efektif dan efisien.
5.	Nama : Sunarwati, SE
	Jabatan : Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas keseluruhan kegiatan operasional Bank. Dan mempunyai fungsi meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank serta peraturan-peraturan pemerintah dan OJK.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. 4. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan <i>digital banking</i> dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat <i>human error</i> agar di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Paulino Krisnawahjuesa, MBA
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
2.	Nama : Yudinata Tjipto Santoso, SE
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
3.	Nama : Haudinata Tjipto Santoso, ST
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
4.	Nama : Alimgunawan Kristanto, B.Sc
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan operasional BPR dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tersebut berjalan “wajar” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian.
Rekomendasi kepada Direksi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi mengupayakan terus menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan memperbaiki tingkat kesehatan nominatif BPR. 2. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan <i>digital banking</i> dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan dapat dipercaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembinaan dan pelatihan yang tepat. 4. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 5. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat <i>human error</i> agar di evaluasi dan di mitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. 	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
2.	Jumlah Rapat : -
	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
3.	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
4.	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
	Komite Manajemen Risiko
5.	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya **)
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
5.	Jumlah Rapat : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dst.	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Lucia Primastuti Rahayu, SE	0	0	0	0
2.	Bibin Hendra Nusarofa, SE	0	0	0	0
3.	Firman Ardiansyah, SE	0	0	0	0
4.	Anang Erfantoro, A.Md	0	0	0	0
5.	Sunarwati, SE	0	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	5.390.000.000	35,23	5.390.000.000	35,23
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	3.825.000.000	25,00	3.825.000.000	25,00
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	3.825.000.000	25,00	3.825.000.000	25,00
4.	Alimgunawan Kristanto, B.Sc	0	0	0	0

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NIHIL			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NIHIL			

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lucia Primastuti Rahayu, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bibin Hendra Nusarofa, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Firman Ardiansyah, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Anang Erfantoro, A.Md	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Sunarwati, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Ada hubungan	Tidak ada	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Ada hubungan
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Ada hubungan	Tidak ada	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Ada hubungan
4.	Alimgunawan Kristanto, B.Sc	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lucia Primastuti Rahayu, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bibin Hendra Nusarofa, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Firman Ardiansyah, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Anang Erfantoro, A.Md	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Sunarwati, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	Tidak ada	Tidak ada	Oferi Kresnawahjuesa, M.Sc,Ph.D-Saudara Kandung, Vinolia-Orang Tua Kandung
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Saudara Kandung	Tidak ada	Haudinata Tjipto Santoso, ST-Saudara Kandung
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Saudara Kandung	Tidak ada	Yudinata Tjipto Santoso, SE-Saudara Kandung
4.	Alimgunawan Kristanto, B.Sc	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	5	1.928.277.036	4	2.005.200.000
2.	Tunjangan	-	-	-	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	5	667.417.551	4	1.991.320.072
Total Remunerasi			2.595.694.587		3.996.520.072
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			2.595.694.587		3.996.520.072

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,65	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,60	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,01	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,69	:	1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	5 Maret 2025	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perubahan Pengurus. 2. Penyesuaian Core Banking System BPR terkait perubahan perlakuan akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP. 3. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal terkait adanya gratifikasi AO. 4. Rencana penambahan jaringan kantor di Kabupaten Pasuruan dan Situbondo.
2.	29 April 2025	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian nominatif AYDA. 2. Tindaklanjut hasil pertemuan Direksi dengan OJK terkait permohonan Sentra Keuangan Khusus (SKK). 3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penyaluran Kredit Konsumtif.
3.	28 Juli 2025	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi penetapan target AYDA/PH/HT, laba dan ketentuan tambahan Bonus. 2. Pemberian Tunjangan Luar Biasa (TLB) kepada Pengurus dan Karyawan. 3. Menindaklanjuti surat persetujuan pembukaan kantor cabang Pasuruan dari OJK. 4. Penetapan target kantor cabang Pasuruan.
4.	20 Oktober 2025	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RBB tahun 2026. 2. Penetapan target tahun 2026.
5.	25 November 2025	4	Pembahasan penetapan KPI dan penetapan pemberian TAT.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Paulino Krisnawahjuesa, MBA	5	0	100,00
2.	Yudinata Tjipto Santoso, SE	5	0	100,00
3.	Haudinata Tjipto Santoso, ST	5	0	100,00
4.	Alimgunawan Kristanto, B.Sc	5	0	100,00

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	1	3
Telah Diselesaikan		-		-		-		3
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	31	-
Dalam Proses Penyelesaian	7	1
Total	38	1

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1.	NIHIL								

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis kegiatan Sosial	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	21 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Pusat Jember.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Pusat Jember.	14.277.066

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis kegiatan Sosial	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
2.	21 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Cabang Probolinggo.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Cabang Probolinggo.	7.179.464
3.	22 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Cabang Bondowoso.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Cabang Bondowoso.	19.530.214
4.	24 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Cabang Ambulu.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Cabang Ambulu.	14.665.864
5.	24 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Cabang Lumajang.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Cabang Lumajang.	10.229.814
6.	25 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Cabang Banyuwangi.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Cabang Banyuwangi.	22.366.214
7.	27 Maret 2025	Sosial	Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, BPR Wilis mengadakan kegiatan pembagian Zakat Fitrah yang dilaksanakan di wilayah kerja kantor Pusat Operasional Jember.	Masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Pusat Operasional Jember.	15.765.914
8.	12 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Ambulu.	Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Sidomulyo, Sanenrejo, Balung dan Kesilir.	6.061.725

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis kegiatan Sosial	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
9.	12 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kantor Pusat BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).	Susteran Kesilir (Panti Jompo) dan Gereja Pantekosta Tanjungrejo, Jember.	7.740.575
10.	15 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Lumajang.	Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Tunjung Rejo Yosowilangun, Lumajang.	5.687.875
11.	15 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Bondowoso.	Panti Asuhan Buah Hati Situbondo.	6.671.822
12.	17 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Probolinggo.	Gereja Santo Paulus, Kraksaan Probolinggo.	5.713.225
13.	18 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Banyuwangi.	Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pantekosta dan Yayasan Cahaya Carmelitas (Panti Asuhan) Banyuwangi.	8.907.750
14.	18 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor cabang Pasuruan.	Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Pasuruan.	3.516.600
15.	18 Desember 2025	Sosial	Dalam rangka menyambut hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BPR Wilis berbagi kasih melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerja kantor Pusat Operasional Jember.	Gereja Katholik Stasi Sempolan Paroki Santo Yusuf dan Gereja Katholik Paroki Tanggul, Jember.	4.821.506

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan *stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan laporan ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Cinde Wilis.

Jember, 27 April 2026

Persetujuan Pengurus PT. BPR Cinde Wilis



Paulino Krisnawahjuesa, MBA
Komisaris Utama



Lucia Primastuti Rahayu, SE
Direktur Utama